

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Setiap negara akan melaksanakan usaha-usaha pembangunan terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Usaha-usaha pembangunan tersebut dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya, memperbaiki taraf hidup sehingga mendapat tempat di antara negara-negara yang ada di dunia serta dapat sejajar dengan kedudukan negara-negara maju. Pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan tentunya bersifat ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi ini dipandang sebagai suatu proses *multidimensional* yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang *komprehensif* baik ekonomi dan non-ekonomi. (Suryana, 2000: 6)

Salah satu permasalahan pembangunan di semua negara tanpa terkecuali Indonesia dalam hal ini adalah pengangguran. Pengangguran ini timbul antara lain karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang artinya kesempatan kerja sedikit sehingga tidak dapat menampung jumlah pekerja (angkatan kerja). Disebutkan bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, berarti pengangguran merupakan tugas besar yang harus dituntaskan segenap pemerintah Indonesia. Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan "bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

*kemanusiaan*”, dengan demikian kesempatan kerja merupakan masalah yang mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Setiap upaya pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak.

Salah satu yang memicu timbulnya permasalahan sentral dalam ketenagakerjaan adalah tidak seimbangnya *demand* dan *supply* tenaga kerja. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab ketidakseimbangan pasar kerja tersebut adalah ketidakcocokan keinginan atau kebutuhan antar pasar kerja dan penggunaan tenaga kerja. Implikasinya masih banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan pekerjaan yang ada dengan kata lain terjadi angka pengangguran.

Berikut ini tabel yang memberikan gambaran bahwa pengangguran di Indonesia setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dan diiringi dengan tingkat kesempatan kerja yang semakin menurun.

**Tabel 1.1 Kesempatan kerja dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia  
Periode 1990-2005**

Tahun	Angkatan Kerja (ribuan orang)	Angkatan Kerja Yang Bekerja (ribuan orang)	Pengangguran Terbuka (ribuan orang)	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (dalam persen)	Tingkat kesempatan kerja (dalam persen)
1990	77,802.00	75,851.00	1,952.00	57,3	97,49
1991	78,456.00	76,423.00	2,032.00	57,1	97,41
1992	80,704.00	78.518.00	2,186.00	57,3	97,29
1993	81,446.00	79.200.00	2,246.00	56,6	97,24
1994	85,777.00	82,039.00	3,738.00	58,0	97,64
1995	86,361.00	80,110.00	6,251.00	56,6	92,76
1996	90,110.00	85,702.00	4,408.00	66,9	95,11
1997	91,325.00	87,050.00	4,275.00	66,3	95,32
1998	92,735.00	87,672.00	5,062.00	66,91	94,54
1999	94,847.00	88,817.00	6,030.00	67,22	93,64
2000	95,651.00	89,838.00	5,813.00	67,76	93,92
2001	98,812.00	90,807.00	8,005.00	68,60	91,90
2002	100,779.00	91,647.00	9,132.00	67,76	90,94
2003	100,316.00	90,785.00	9,531.00	67,86	90,50
2004	103,973.00	93,722.00	10,251.00	67,54	90,14
2005	105,802.00	94,948.00	10,854.00	68,02	89,74

Sumber : Statistik tenaga kerja, BPS diolah

Terlihat dari tabel angka pengangguran bertambah setiap tahunnya, dimana antara jumlah angkatan kerja dan angkatan bekerja tidak seimbang dimana angkatan kerja lebih banyak daripada jumlah angkatan kerja yang bekerja. Kemudian TPAK menunjukkan angka yang berfluktuasi dan pada periode 1990 sampai 2005 TPAK hanya bisa mencapai rata-rata 63,62 persen. Hal itu menunjukkan angka TPAK yang masih kecil karena belum mendekati TPAK 100%. Angka TPAK rata-rata TPAK yang mencapai 63,62 persen tersebut mengindikasikan bahwa masih ada sebagian 36,38 penduduk usia bekerja yang belum bekerja. Sedangkan tingkat kesempatan kerja hampir mencapai 90 persen, namun jika diperhatikan dalam tabel angka kesempatan kerja menunjukkan

penurunan presentase setiap tahunnya dan penurunan tingkat kesempatan kerja ini diikuti oleh kenaikan tingkat pengangguran. Pada periode antara tahun 1990 sampai tahun 1994 kenaikan pengangguran tidak terlalu tinggi kenaikannya karena pada periode tahun tersebut keadaan ekonomi dalam keadaan stabil. Namun mulai periode tahun 1995 kenaikan pengangguran semakin tinggi mencapai angka lima juta lebih. Dan tahun-tahun selanjutnya sampai tahun terakhir pada tabel pengangguran Indonesia mencapai 11 juta jiwa. Pengangguran disini adalah pengangguran terbuka. Berikut ini tabel yang menunjukkan bahwa pemenuhan tenaga kerja tidak mencukupi jumlah pencari kerja di Indonesia

**Tabel 1.2. Pencari Kerja, Permintaan Tenaga Kerja dan Pemenuhan Tenaga Kerja Periode Tahun 1990-2005**

<b>Tahun</b>	<b>Pencari Kerja</b>	<b>Permintaan Tenaga Kerja</b>	<b>Pemenuhan Tenaga Kerja</b>	<b>Pemenuhan tenaga kerja (dalam persen)</b>
1990	1.217.148	227.339	167.346	13,75
1991	1.238.717	272.965	198.883	16,06
1992	1.324.681	301.553	282.357	21,32
1993	1.324.681	301.553	282.357	21,32
1994	1.213.018	364.240	327.852	27,03
1995	1.198.551	462.257	398.300	33,23
1996	1.497.159	629.164	527.248	35,22
1997	1.542.522	593.153	492.705	31,94
1998	1.542.522	593.153	492.705	31,94
1999	1.240.562	561.609	485.178	39,11
2000	1.191.750	475.260	395.214	33,16
2001	975.215	388.058	320.758	32,89
2002	343.205	102.906	85.697	24,97
2003	427.525	132.231	61.047	14,28
2004	418.773	97.801	75.816	18,10
2005	382.706	167.724	141.277	36,92

Sumber : Statistik tenaga kerja, BPS diolah

Berdasarkan tabel 1.2. terlihat antara pencari kerja dan pemenuhan tenaga kerja perbandingannya sangat tinggi atau mempunyai nilai gap yang jauh setiap tahunnya. Misalnya pada tabel terlihat pada tahun 1990 pencari kerja sebanyak

1.217.148 jiwa sedangkan pemenuhan tenaga kerja hanya menampung sebanyak 167.346 jiwa. Dan presentase pemenuhan tenaga kerja dari pencari kerja dari periode tersebut Indonesia tidak pernah mencapai angka 50 persen dan angka presentase penyerapannya berfluktuatif. Tetapi dari angka presentase tersebut menunjukkan angka yang kecil bagi Indonesia yang mempunyai angkatan kerja yang surplus.

Kunci permasalahan dari banyaknya pengangguran dari pembahasan sebelumnya yaitu kurangnya kesempatan kerja yang memadai. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa, Meski makro ekonomi sepanjang tahun 2003 terus mengalami perbaikan, ironisnya pemerintah gagal menyentuh masalah yang paling krusial, yakni penciptaan kesempatan kerja yang cukup dan pemberantasan kemiskinan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini diakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih antara 3 sampai 4 persen. Dengan angka sebesar itu, tidak cukup memadai untuk menampung jumlah angkatan kerja baru yang masuk ke pasar. Dalam dua tahun terakhir ini jumlah pengangguran terbuka mengalami peningkatan drastis. **(Imam Sugema :2003)**

Dari sudut pandang ekonomi makro, perluasan kesempatan kerja dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita secara konstan dalam jangka panjang. Peningkatan output merupakan akibat dari peningkatan aktivitas produksi secara keseluruhan. Peningkatan aktivitas produksi merupakan bagian dari sisi penawaran perluasan kesempatan kerja akan terjadi bila sisi permintaan juga mengalami peningkatan

dengan kata lain, kesempatan kerja akan tercipta bila terjadi peningkatan pada sisi permintaan dan penawaran agregat. (Boediono : 1999)

**Tabel 1.3. Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Periode 1990-2005**  
Atas Dasar Harga Konstan

Tahun	Tahun 2000	
	Miliar Rupiah	Pertumbuhan (dalam persen)
1990	875.024,96	7,24
1991	936.400,36	6,95
1992	999.720,93	6,46
1993	1.151.729,48	7,83
1994	1.238.569,55	7,54
1995	1.340.380,41	8,22
1996	1.445.173,48	7,82
1997	1.513.094,89	4,70
1998	1.314.475,07	-13,13
1999	1.324.874,14	0,79
2000	1.389.770,30	4,90
2001	1.442.984,60	3,83
2002	1.506.124,40	4,38
2003	1.579.559,00	4,88
2004	1.656.825,70	4,89
2005	1.749.546,90	5,60

Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistika

Tabel 1.5. merupakan tabel yang menggambarkan mengenai PDB (*Produk Domestik Bruto*) atas dasar harga konstan 2000. Laju pertumbuhan perekonomian Indonesia diukur berdasarkan PDB atas dasar harga konstan. Dimana dilihat dari perkembangannya laju pertumbuhan ekonomi sebelum krisis moneter mengalami kenaikan setiap tahunnya dan kemudian pada tahun 1998 mengalami penurunan sebesar -13,13 %, kemudian tahun selanjutnya tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 0,79 %, namun kenaikan tersebut tidak banyak memberi arti apa-apa. Berkembangan selanjutnya tahun 2000 perkembangan pertumbuhan ekonomi mulai meningkat sebesar 4,90 % angka yang perkembangan yang bagus untuk awal yang baik dalam memperbaiki kondisi ekonomi. Tahun-tahun berikutnya perkembangan laju pertumbuhan ekonomi berfluktuasi.

Sementara itu pada kenyataannya, prospek perluasan lapangan kerja 2003 masih suram karena pertumbuhan ekonomi hanya 3-4 persen. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja hanya sekitar 1,2 juta orang. Padahal, angkatan kerja yang masuk pasar kerja 2,5 juta orang. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dari 38 juta menjadi 40,5 juta. Bila merujuk pada jumlah angkatan kerja yang pada tahun 2001 mencapai 98,8 juta orang, berarti persentase pengangguran telah mencapai 30 persen di tahun 2003. Sebab, tingkat pertumbuhan angka pengangguran mencapai 1,5 juta orang per tahun. Untuk dapat menampung angka pengangguran tersebut, ekonomi harus tumbuh paling sedikit lima persen untuk mencapai tingkat itu sangat sulit mengingat banyak keterbatasan dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah. (kmb2.www.balipost.com).

Permasalahan yang perlu diperhatikan mengenai kesempatan kerja yaitu upah. Dimana upah merupakan landasan hubungan kerja yang perlu dikaji ulang, karena masih banyak pekerja yang belum mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan fisik minimum, kebutuhan hidup minimum. Ditengah krisis ekonomi persepsi pengusaha dengan pekerja sering berbeda, sehingga mempersulit dalam mencari jalan pemecahannya. (Priyono Tjiptoherijanto, 2001:1).

Bagi para pekerja upah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan tinggi rendahnya upah yang diterima akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan hidup yang dialami pekerja. Bagi perusahaan upah mempengaruhi biaya produksi dan tingkat harga yang akhirnya akan berakibat

pada penambahan produksi serta perluasan kesempatan kerja. **(Priyono Tjiptoherijanto, 1993:3).**

Dari catatan yang ada, upah minimum riil rata-rata meningkat jauh lebih tajam daripada pertumbuhan pendapatan nasional. Bila tingkat pendapatan nasional tumbuh di bawah 5 persen sepanjang 1998-2005, upah minimum meningkat 12-17% persen setiap tahun pada kurun waktu yang sama. Perbedaan antara kenaikan upah minimum dan pendapatan nasional riil menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja di sektor formal. Sebab, perusahaan menyalasi kenaikan ongkos produksi akibat tingginya upah melalui penambahan beban pekerjaan dan substitusi dengan mesin. Satu simulasi yang dilakukan tim SMERU menunjukkan, setiap kenaikan 10 persen upah minimum mengakibatkan penyempitan kesempatan kerja rata-rata sebesar 1 persen di sektor formal. Dari simulasi yang sama, setiap kenaikan 10 persen upah minimum meningkatkan jumlah kehilangan kerja lebih besar lagi, sebesar 2 persen, pada pekerja berpendidikan rendah. Padahal, data menunjukkan, sekitar 80 persen tenaga kerja di Indonesia berpendidikan rendah. **(M.Ikhsan Modjo:2006)**

Upah buruh Indonesia di bawah upah buruh Internasional Di AS, upah minimum adalah US\$ 5-8 per jam atau US\$ 840 - 1.344 per bulan (Rp 7,8 - 12,6 juta per bulan). Di Singapura tidak ada UMR, tapi rata2 buruh manufaktur, gaji per bulannya adalah US\$ 1.600 perbulan (Rp 15 juta). Bahkan TKW kita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura, gajinya sekitar Rp 1,5 juta per bulan, sementara di Indonesia hanya Rp 250 ribu per bulan. UMR di Indonesia berkisar antara Rp 711.000 sampai Rp 300 ribu per bulan (US\$ 32 -

75). Upah serendah itu pun sering dianggap terlalu besar, sehingga banyak pekerja yang gajinya di bawah UMR. (<http://osdir.com/ml/culture.region.Ind.html>)

Dari permasalahan yang telah di uraikan tersebut perluasan kesempatan kerja melalui kebijakan penentuan upah dan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan. Permasalahan kekurangan kesempatan kerja ini jika tidak ada tindak lanjut akan mempengaruhi perekonomian yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. maka dari pembahasan tersebut penulis tertarik lebih jauh mengenai perluasan kesempatan kerja dalam rangka menuntaskan pengangguran. Sehingga penulis mengambil judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap kesempatan Kerja Di Indonesia Periode tahun 1990-2005”**

## **1.2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Yang menjadi rumusan masalah sesuai dengan latar belakang dalam makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh upah terhadap kesempatan kerja di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh upah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja?

### 1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

#### 1.3.1. Tujuan Penyusunan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh upah terhadap kesempatan kerja.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap kesempatan kerja.

#### 1.3.2. Kegunaan Penyusunan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi tambahan bagi para mahasiswa untuk mengetahui apakah besarnya pertumbuhan ekonomi dan upah mempengaruhi terhadap kesempatan kerja
2. Untuk memberikan sumbangan terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya masalah perkembangan kesempatan kerja.
3. Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut mengenai kesempatan kerja.

### 1.4. KERANGKA PEMIKIRAN

**Teori Klasik** mengemukakan pandangan mereka mengenai kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*). Keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (*equilibrium with full employment*) itu hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar

bebas. Jadi adanya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas tanpa campur tangan pemerintah itu merupakan *necessary condition* bagi tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh. Keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh tersebut menurut kaum klasik merupakan kondisi yang ideal atau normal dari suatu perekonomian. Jika sampai terjadi pengangguran di dalam perekonomian, maka hal tersebut hanyalah gejala atau fenomena yang bersifat sementara, dimana dalam jangka panjang akan hilang dengan sendirinya melalui bekerjanya secara bebas mekanisme pasar itu. **(Muana Nanga, 2001:35)**

Pandangan klasik bahwa perekonomian tidak akan kekurangan permintaan agregat berarti segala barang yang diproduksi akan dapat dijual, tingkat produksi nasional dan kegiatan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Atas dasar tersebut jumlah produksi (output) sebagai dasar untuk menentukan kesempatan kerja. Fungsi produksi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara jumlah produksi yang akan dihasilkan dengan jumlah faktor produksi (tenaga kerja) yang digunakan dalam suatu proses produksi. secara sederhana fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y = f(K, N, \dots) \dots (1.1)$$

dengan asumsi, dalam jangka pendek tenaga kerja (N) merupakan satu-satunya input yang dapat diubah-ubah penggunaannya, sedangkan faktor produksi lainnya seperti modal (K), ditentukan pada tingkat penggunaan tertentu. **(Djuhari, 1998:15)**

Pandangan klasik bahwa tingkat harga dan upah di dalam perekonomian adalah cukup fleksibel, artinya harga-harga barang dan upah tenaga kerja

sewaktu-waktu dengan cepat disesuaikan (kalau diperlukan). Adanya fleksibilitas tingkat harga dan upah inilah menurut kaum klasik yang menjamin selalu tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh di dalam perekonomian. **(Muana Nanga, 2001:36)**

Menurut pandangan klasik yang langsung menentukan *volume employment* dan output bukanlah tingkat harga tetapi struktur intern dari harga. Tegasnya keputusan produsen mengenai output dan employment adalah tergantung pada hubungan antara ongkosnya (upah) dan harga yang dibayar oleh pembeli outputnya. Setiap penjual menghasilkan output sampai pada tingkat ongkos marginalnya sama dengan harga yang sudah tertentu. Hubungan antara tingkat upah dan ongkos marginalnya, dimana dengan asumsi bahwa input variabel hanyalah tenaga kerja, dan dipengaruhi oleh hukum semakin berkurangnya hasil (*the law of deminishing returns*). Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan melalui persamaan sebagai berikut:

$$P = MC$$

$$\text{Dan } MC = \frac{W}{MPL}$$

$$\text{Maka } W = P \cdot MPL \dots\dots(1) \quad \text{(Gardner Ackley, 1961:161)}$$

Dimana  $p$  adalah harga tiap satuan output,  $W$  adalah upah tiap satuan input,  $MC$  adalah ongkos marginal daripada output,  $MPL$  adalah produk marginal tiap satuan tenaga kerja. Rumus 1.2 dapat dirubah menjadi bentuk sebagai berikut

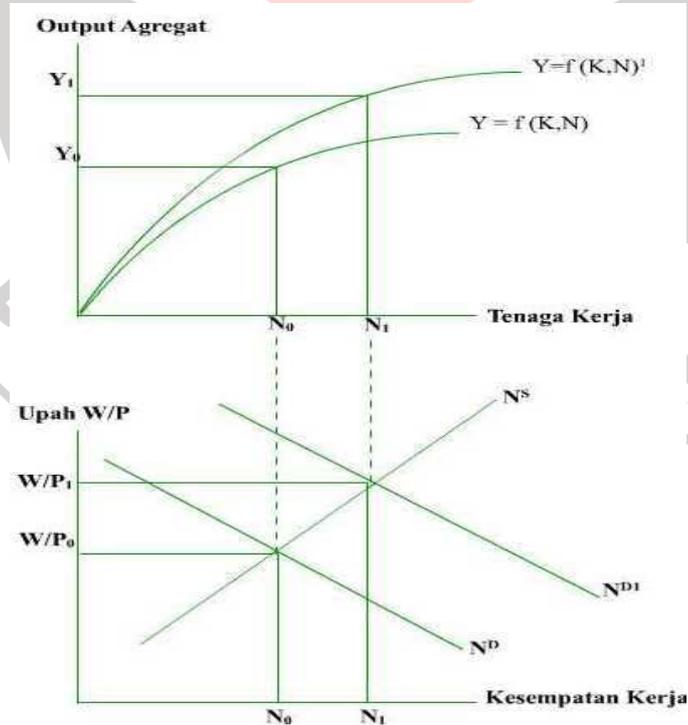
$$: MPL = \frac{W}{P}, \text{ rumus ini menyatakan bahwa produsen akan mempekerjakan tenaga}$$

kerja (input) sampai pada titik dimana produk marginal sama dengan upah riil

yaitu upah uang yang dinilai menurut tingkat harga output. (**Gardney Ackley, 1961: 162**).

Sementara dari sisi penawaran, individu pekerja dipandang menganut prinsip maksimisasi kepuasan. Mereka akan mempertimbangkan penggunaan waktu mereka antara bekerja atau santai. Meningkatnya upah identik dengan meningkatnya harga santai, sebagaimana hukum permintaan bahwa kenaikan harga suatu barang atau faktor akan cenderung menurunkan jumlah barang atau faktor yang diminta, maka akan makin banyak jasa pekerja yang ditawarkan pada tingkat upah makin tinggi. (**J.J. Sarungu, 2004: 183**)

Hubungan antara pertumbuhan output ,tingkat upah dan peningkatan kesempatan kerja didalam ekonomi diilustrasikan secara grafik pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1. Fungsi Produksi dan Pasar Tenaga Kerja**

Sumber :Tulus Tambunan, 1996:66

Di pasar tenaga kerja bertemu dua kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan besar kecilnya volume kesempatan kerja dan tingkat upah riil. Volume kesempatan kerja melalui fungsi produksi menentukan jumlah output bertambah dari (Y0-Y1). Kurva fungsi produksi yang tidak linear itu menandakan bahwa presentase pertumbuhan output di atas proposional dari presentase penambahan tenaga kerja. Ini berarti, tidak hanya volume kesempatan kerja saja, tetapi juga produktivitasnya meningkat. Sudut dari kurva fungsi produksi tersebut merupakan marginal produk dari tenaga kerja dipengaruhi oleh teknologi yang menentukan berapa banyak volume kesempatan kerja yang diperlukan untuk membuat satu buah atau sejumlah output. Penambahan kesempatan kerja dicerminkan kurva ND ke kanan. (Tulus Tambunan, 1996:66-67)

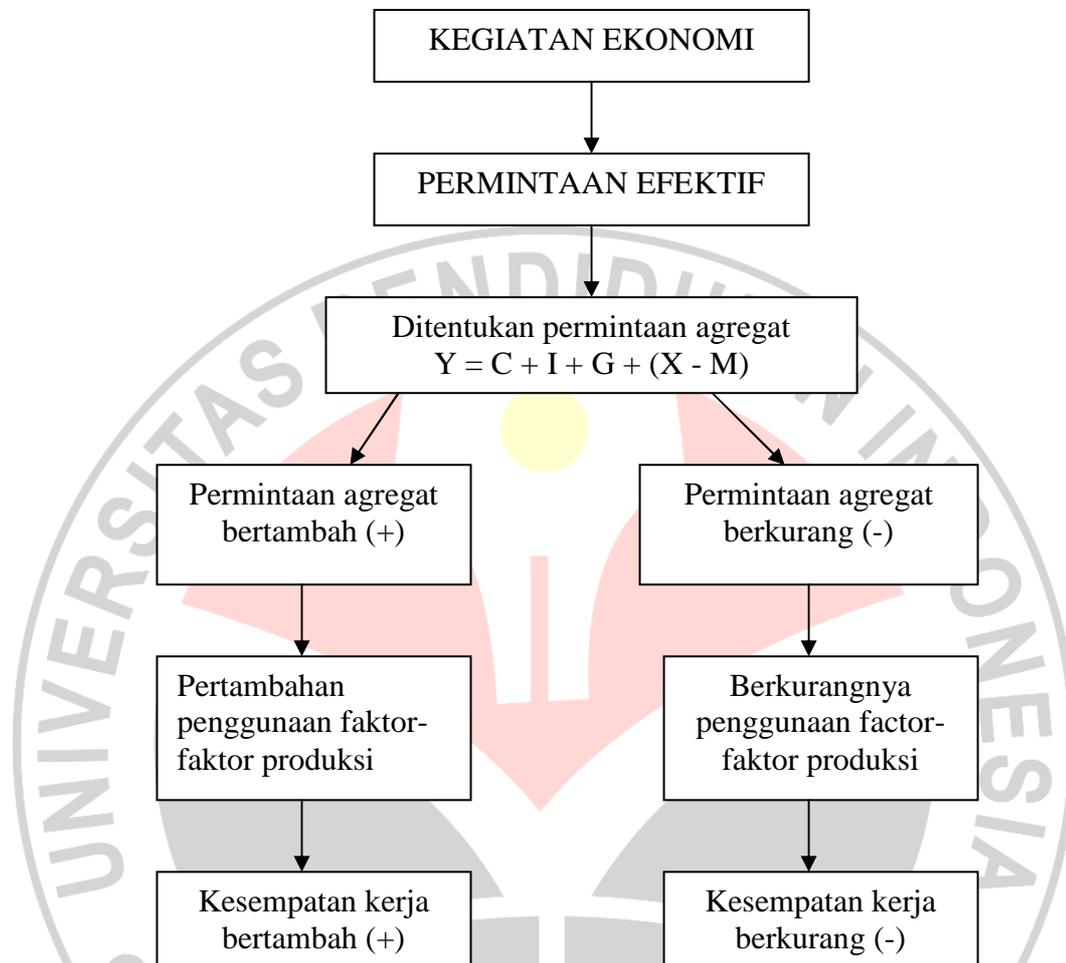
Berbicara mengenai kesempatan kerja pandangan **Keynes** berbeda dengan klasik beberapa tokoh ekonomi mengemukakan teorinya. Menurutnya kegiatan perekonomian tergantung kepada segi permintaan, yaitu tergantung kepada perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan perekonomian pada suatu waktu tertentu. Yang diartikan dengan pengeluaran agregat adalah *pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sesuatu perekonomian dalam suatu periode tertentu, dan biasanya diukur untuk suatu tahun tertentu*. Semakin besar perbelanjaan agregat (permintaan agregat) yang dilakukan dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Perbelanjaan agregat (permintaan agregat) yang wujud tidak selalu mencapai tingkat perbelanjaan yang diperlukan untuk

mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh sebab itu pengangguran akan selalu berlaku. Untuk mengatasinya pemerintah perlu mempengaruhi perbelanjaan agregat, dan hal ini terutama dilakukan dengan menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. **(Sadono Sukirno, 1994:95-96)**

Komponen utama perbelanjaan agregat atau permintaan agregat terdiri dari empat komponen dasar yaitu : (1) total permintaan barang dan jasa oleh konsumen swasta (C); (2) total permintaan barang investasi oleh perusahaan-perusahaan swasta (I); (3) permintaan barang dan jasa untuk konsumsi maupun untuk investasi pemerintah (G) dan (4) surplus neraca perdagangan atau selisih ekspor atas impor (E – M). Jika pendapatan nasional atau produk nasional Bruto (GNP/ Gross National Product) dinotasikan dengan Y, maka secara sederhana dapat ditulis :

$$Y = C + I + G + (E - M)$$

Dengan demikian pendapatan nasional atau pengeluaran (Y) ditentukan oleh permintaan agregat (C+I+G+(E – M)). Dalam hal ini, diasumsikan bahwa terdapat hubungan antara output nasional dan kesempatan kerja nasional (N), yang ditunjukkan dalam bentuk fungsi produksi nasional dengan  $Y = f(N, K, t)$ , yang mana  $f'_N > 0$  dan  $f''_N < 0$ . Untuk tingkat teknologi tertentu (t) dan faktor tanah dan modal yang tertentu (K), total output nasional (GNP *real*) mempunyai hubungan positif dengan kesempatan kerja. Semakin tinggi output nasional (Y) semakin tinggi kesempatan kerja (N). Tetapi ketika total kesempatan kerja dalam suatu masyarakat dibatasi oleh besarnya angkatan kerja yang aktif maka terdapat suatu dimana output nasional maksimum yang hanya dapat dicapai pada kondisi kesempatan kerja penuh (full employment). **(J.J Sarungu, 2004:184)**



**Gambar 1.2. Skema Pemikiran Keynes Mengenai Kesempatan kerja**

Menurut Keynes (**Komarudin, 2001:85**), kesempatan kerja besar kecilnya juga ditentukan oleh investasi terutama didukung oleh investasi dalam negeri, jika perekonomian berada dalam keseimbangan maka penawaran total akan sama dengan permintaan total. Permintaan total tersebut ditentukan oleh kecenderungan konsumsi dan investasi. Oleh sebab itu Keynes mengatakan:

*“Jumlah kesempatan kerja ( $N$ ) tergantung pada fungsi penawaran total ( $Z$ ), kecenderungan konsumsi ( $C$ ), dan jumlah Investasi ( $N$ )”.*

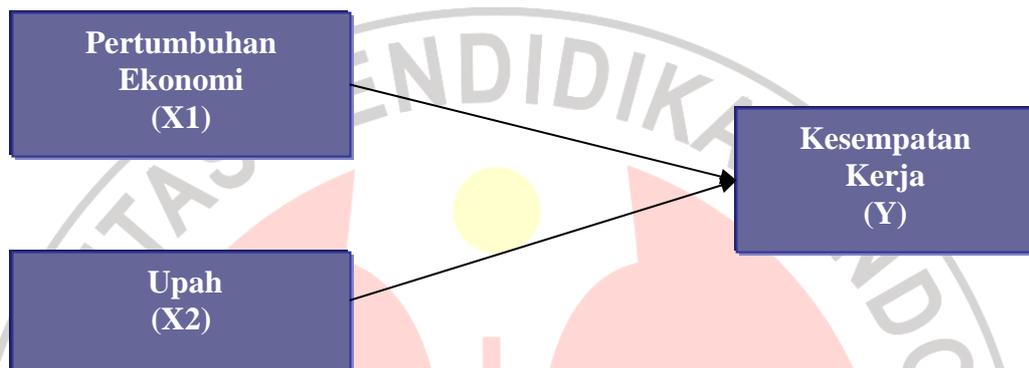
Pandangan Keynes tersebut bahwa peranan investasi dalam membentuk permintaan efektif sangat penting hal tersebut menurut **Keynes** dikarenakan kesempatan kerja total tergantung pada permintaan total dan pengangguran timbul karena kekurangan permintaan total. Permintaan efektif memanifestasi diri sendiri dalam bentuk pengeluaran pendapatan. Sewaktu kesempatan kerja bertambah, pendapatan bertambah, sebuah prinsip fundamental adalah, bahwa bilamana, pendapatan nyata sewaktu masyarakat bertambah, konsumsi juga bertambah tetapi jumlahnya kurang dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan tersebut. Maka agar dapat mencukupi, permintaan untuk mempertahankan kesempatan kerja harus dapat sesuatu pertambahan dalam investasi nyata. **(Winardi,1975:21)**

Pandangan Keynes berbeda dengan klasik dan mengenai harga dan upah yang dianggap luwes atau fleksibel. Menurut Keynes beranggapan bahwa penurunan upah cenderung tidak luwes (rigid). Ketidakluwesannya itu disebabkan oleh faktor-faktor institusional, seperti perjanjian serikat buruh, undang-undang upah minimum, dan perjanjian implisit (antara majikan dan buruh). Dalam periode menurunnya permintaan total terhadap barang dan jasa, perusahaan-perusahaan bereaksi terhadap penurunan penjualan dengan mengurangi produksi dan memberhentikan buruh, bukan dengan memotong upah. Menurut Keynes, penurunan harga pun sama kakunya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penurunan permintaan efektif pada awalnya menyebabkan penurunan produksi dan kesempatan kerja bukan penurunan harga. **(Komaruddin, 2001:89)**

Kemudian salah satu teori yang menjelaskan hubungan kesempatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi adalah *Hukum Okun*. *Hukum Okun* menjelaskan hubungan antara output dan tingkat pengangguran dengan asumsi bahwa output dan *employment* bergerak sama, jadi perubahan pada output akan menghasilkan perubahan yang sama pada *employment* juga diasumsikan bahwa angkatan kerja adalah konstan, jadi satu perubahan pada *employment* akan menyebabkan satu perubahan pada tingkat pengangguran. *Hukum Okun menyatakan bahwa untuk setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, kesempatan kerja menurunt sekitar 1 persen. (Samuelson & Nordhaus, 2001 :365-366)*

Berdasarkan tinjauan teoritis yang dikemukakan maka pertumbuhan ekonomi dan upah secara bersama-sama mempengaruhi terhadap kesempatan kerja. Dimana jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka kesempatan kerja pun mengalami kenaikan. Dan jika sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka kesempatan kerja pun akan mengalami penurunan. Dari penjabaran tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dengan kesempatan kerja. Kemudian besarnya upah mempunyai hubungan negatif terhadap kesempatan kerja. Jika upah mengalami kenaikan maka kesempatan kerja mengalami penurunan dan sebaliknya jika upah mengalami penurunan maka kesempatan kerja akan mengalami kenaikan. Dari hubungan tersebut maka dapat digambarkan dalam suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel Independent (variabel bebas) atau disebut variabel X1
2. Upah sebagai variabel independent kedua atau disebut variabel X2
3. Kesempatan Kerja sebagai variabel dependent (terikat) atau disebut variabel Y



**Gambar 1.3. Kerangka Pemikiran**

### **1.5. HIPOTESIS**

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Indonesia.
2. Upah berpengaruh secara negatif terhadap kesempatan kerja di Indonesia.
3. Pertumbuhan ekonomi dan Upah berpengaruh secara signifikan terhadap kesempatan kerja di Indonesia.